

## Pengaruh Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Terhadap Kualitas Pengelolaan Koperasi di Kabupaten Dompu

Marwan<sup>1</sup>, Samsudin<sup>2</sup>, Fahrul Mauzu<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: [marwan.mbozo0282@gmail.com](mailto:marwan.mbozo0282@gmail.com)



©2018 –Bongaya Journal for Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**Abstract:** *This study aims to analyze the effect of guidance from the Cooperative and SME Agency on the quality of cooperative management in Dompu Regency. Using a quantitative approach with a sample of 125 respondents, the data were analyzed through classical assumption tests, simple linear regression, and hypothesis testing (t-test). The results of the validity and reliability tests indicate that the research instruments are consistent and valid. Classical assumption tests confirm that the data are normally distributed, free from multicollinearity, and show no signs of heteroscedasticity. The research findings reveal that the guidance provided by the Cooperative and SME Agency has a positive and significant effect on the Quality of Cooperative Management, with a significance value of  $0.004 < 0.05$  and a calculated t-value of 2.931. The coefficient of determination (R-squared) of 0.065 indicates that the guidance contributes 6.5%, while the remainder is influenced by other external factors. It is concluded that strengthening technical guidance, supervision, and intensive training by the Cooperative Agency is the key to improving professionalism and transparency in cooperative governance in Dompu Regency. It is recommended that the relevant agency optimize direct on-site assistance to ensure the sustainability of healthy and independent cooperative enterprises.*

**Keywords:** *Capacity Building, Department of Cooperatives and SMEs, Quality of Cooperative Management.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Kualitas Pengelolaan Koperasi di Kabupaten Dompu. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 125 responden, data dianalisis melalui uji asumsi klasik, regresi linear sederhana, dan uji hipotesis (Uji T). Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan instrumen penelitian bersifat konsisten dan valid. Uji asumsi klasik mengonfirmasi bahwa data berdistribusi normal, bebas dari multikolinearitas, dan tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Koperasi dengan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$  dan t hitung 2,931. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,065 menunjukkan kontribusi pembinaan sebesar 6,5%, sementara sisanya dipengaruhi faktor eksternal lain. Disimpulkan bahwa penguatan bimbingan teknis, pengawasan, dan pelatihan secara intensif oleh Dinas Koperasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan profesionalisme serta transparansi tata kelola koperasi di Kabupaten Dompu. Disarankan agar dinas terkait mengoptimalkan pendampingan langsung di lapangan guna memastikan keberlanjutan usaha koperasi yang sehat dan mandiri.

**Kata kunci:** Pembinaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Kualitas Pengelolaan Koperasi.

## **PENDAHULUAN**

Koperasi menempati posisi yang sangat fundamental dalam sistem perekonomian Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dirancang untuk menjadi pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mengedepankan kesejahteraan anggota di atas kepentingan modal individu (Purwadinata *et al.*, 2026). Menurut Awaluddin & Weraman, (2023) kehadiran koperasi diharapkan mampu menciptakan demokratisasi ekonomi, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis melalui prinsip-prinsip perkoperasian yang luhur.

Dalam pembangunan daerah, Kabupaten Dompu memiliki karakteristik agraris yang kuat, koperasi memegang peran penting sebagai jembatan bagi para petani, peternak, dan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan keadilan ekonomi (Putra & Zubaidah, 2024). Melalui wadah ini, potensi lokal yang melimpah, seperti komoditas jagung dan peternakan, seharusnya dapat dikelola secara bersama-sama untuk meningkatkan nilai tawar masyarakat di tengah arus pasar global yang semakin kompetitif. Menurut Sundari, (2024) koperasi tidak hanya dilihat sebagai lembaga keuangan semata, melainkan sebagai ekosistem sosial dan ekonomi yang mampu meningkatkan kemandirian daerah melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Peran vital Dinas Koperasi dan UMKM Meskipun secara filosofis koperasi bersifat otonom dan mandiri, dalam praktiknya diperlukan intervensi positif dari pemerintah agar lembaga ini tetap berjalan di atas koridor hukum dan standar manajemen yang sehat. Menurut (Sukmaya *et al.*, 2026) upaya pemberdayaan sektor UMKM menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui penciptaan ekosistem yang kondusif bagi lahirnya wirausaha baru. Di sinilah letak peran vital Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu sebagai representasi negara di tingkat lokal yang memiliki mandat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap seluruh entitas koperasi yang ada. Tanpa kehadiran fungsi pembinaan yang efektif, koperasi berisiko kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya serta rentan terhadap penyimpangan tata kelola yang merugikan anggota (Wulansari *et al.*, 2021).

Menurut Fitriani *et al.*, (2024) efektifitas pengelolaan sebuah koperasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aparatur pembina mampu memberikan bimbingan teknis, edukasi manajerial, hingga fasilitasi akses permodalan. Dinas Koperasi dan UMKM bukan sekadar lembaga administratif, melainkan motor penggerak yang harus memastikan bahwa setiap kebijakan nasional dapat terimplementasi dengan baik di tingkat daerah (Aryani *et al.*, 2026) sinergi antara kebijakan pembinaan Dinas Koperasi dengan pelaksanaan manajemen internal koperasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem perkoperasian yang tangguh dan profesional di Kabupaten Dompu.

Realita yang terjadi di Kabupaten Dompu menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara harapan ideal dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Secara kuantitas, jumlah koperasi yang terdaftar memang mengalami pertumbuhan, menurut data dari (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu, 2025) di tahun 2023 jumlah koperasi yang terdaftar sebanyak 378 unit, kemudian di tahun 2024 sebanyak 380 unit, dan di tahun 2025 jumlah koperasi secara keseluruhan yang tercatat secara administratif mencapai 380 unit yang tersebar di delapan kecamatan yang berada di kabupaten Dompu. Tetapi secara kualitas masih banyak ditemukan koperasi yang hanya berstatus hanya sebagai papan nama atau tidak aktif secara operasionalnya sebanyak 380 Koperasi. Fenomena yang paling mencolok adalah rendahnya tingkat kepatuhan koperasi dalam menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan

(RAT), yang merupakan kedaulatan tertinggi dan indikator utama kesehatan sebuah organisasi koperasi. Di tahun 2025 jumlah koperasi yang aktif mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya sekitar 125 Koperasi.

Selain masalah administratif, banyak koperasi di Kabupaten Dompu yang mengalami stagnasi usaha akibat ketidakmampuan bersaing dengan lembaga keuangan komersial maupun pinjaman informal. Menurut Ondang *et al.*, (2019) transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan masih menjadi persoalan klasik yang sering kali memicu ketidakpercayaan anggota, sehingga partisipasi masyarakat dalam mengembangkan koperasi semakin menurun. Hariyanto & Manajemen, (2017) menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan adanya hambatan besar dalam sistem pengelolaan internal yang belum mampu beradaptasi dengan tuntutan profesionalisme dan digitalisasi di era modern saat ini.

Menurut Nawawi, (2022) akar dari berbagai permasalahan tersebut sering kali bermuara pada kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang belum memiliki kompetensi manajemen yang memadai. Sebagian besar pengurus koperasi di Kabupaten Dompu masih menjalankan organisasi dengan pola tradisional tanpa dukungan literasi keuangan dan manajerial yang baik. Menurut Eman *et al.*, (2023) kurangnya pemahaman mengenai tata kelola organisasi yang baik (*Good Corporate Governance*) menyebabkan pengambilan keputusan sering kali bersifat subjektif dan tidak berbasis pada analisis data yang akurat, sehingga efisiensi operasional sulit tercapai. Selain itu, pola pembinaan yang dijalankan oleh Dinas terkait disinyalir masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan personil pengawas maupun metode pembinaan yang cenderung bersifat seremonial dan belum menyentuh substansi kebutuhan koperasi. Menurut Fadhilah *et al.*, (2023) Program pelatihan yang diberikan dinas koperasi terkadang tidak berkelanjutan atau tidak memiliki sistem monitoring yang ketat, sehingga ilmu yang didapatkan oleh para pengurus koperasi tidak terimplementasi secara maksimal dalam operasional harian. Kurangnya pendampingan teknis yang intensif menyebabkan koperasi sulit keluar dari jeratan masalah internal yang kompleks (Santya & Kustini, 2025).

Penelitian mengenai pengaruh pembinaan ini menjadi sangat penting dilakukan mengingat Kabupaten Dompu tengah berupaya melakukan akselerasi ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan. Jika koperasi-koperasi di Dompu tidak segera diperbaiki tata kelolanya melalui pembinaan yang tepat, maka potensi ekonomi kerakyatan akan terus tergerus oleh kekuatan modal besar yang tidak memihak pada masyarakat kecil. Kegagalan dalam membina koperasi sama saja dengan membiarkan pilar ekonomi rakyat runtuh, yang pada akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan dan ketergantungan masyarakat pada sistem keuangan yang tidak adil. Selain itu, penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Koperasi daerah untuk merumuskan ulang strategi pembinaan yang lebih adaptif dan solutif. Di tengah tuntutan transformasi digital, koperasi di Dompu harus didorong untuk melakukan modernisasi manajemen agar tetap relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai model pembinaan yang efektif, sehingga dana dan tenaga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dompu.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan untuk menguji secara empiris sejauh mana variabel pembinaan yang dilakukan oleh instansi Dinas Koperasi berkontribusi terhadap perubahan kualitas manajemen koperasi. Peneliti memandang bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal pengurus, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, terutama peran aktif dinas pembina dalam memberikan supervisi dan dukungan yang berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mencari solusi atas kendala-kendala perkoperasian di daerah, maka artikel ini disusun dengan judul: "Pengaruh Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Terhadap Kualitas

Pengelolaan Koperasi di Kabupaten Dompu". Fokus penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan antara pemerintah sebagai pembina dan koperasi sebagai objek yang dibina dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.

### ***Teori Manajemen***

Manajemen adalah sebuah proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya baik manusia, keuangan, maupun fisik untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Fahmi *et al.*, 2026). Syamil *et al.*, (2026) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan menurut (Suryana, 2026) manajemen dari perspektif fungsionalitas kepemimpinan, di mana ia membagi manajemen ke dalam lima unsur utama, yakni meramalkan dan merencanakan (*to forecast and plan*), mengorganisir (*to organize*), memerintah (*to command*), mengkoordinasi (*to coordinate*), dan mengawasi (*to control*). Menurut (Metris *et al.*, 2024) pengelolaan organisasi yang ideal bersandar pada empat pilar fungsional yakni perencanaan yang terukur, pengorganisasian struktur yang jelas, penggerakan sumber daya manusia secara tepat, serta pengawasan yang konsisten. Konsep ini memberikan kerangka kerja bagi koperasi untuk mentransformasi prinsip kekeluargaan ke dalam praktik manajerial yang profesional, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan selaras dengan target kesejahteraan anggota.

### ***Kualitas Pengelolaan Koperasi***

Tata kelola koperasi pada dasarnya merupakan seni menggerakkan organisasi secara bersama dengan mengacu pada empat pilar utama manajemen, yakni perencanaan strategi, pembagian struktur tugas, pelaksanaan program kerja, serta pengawasan secara berkala. Menurut Maulidah & Sukardjo, (2018) kualitas pengelolaan koperasi adalah tingkat efektivitas dan efisiensi pengurus dalam menjalankan roda organisasi berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian dan kaidah manajemen profesional untuk mencapai tujuan bersama. Awaluddin & Weraman, (2023) memandang pengelolaan koperasi sebagai sebuah sistem manajemen yang spesifik, di mana terdapat koordinasi yang harmonis antara perangkat organisasi yakni Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Menurut Nuraisyah, (2019) pengelolaan koperasi merupakan manajemen organisasi yang berfokus pada pelayanan anggota (*member-oriented*). Menurutnya, keberhasilan pengelolaan koperasi tidak hanya diukur dari efisiensi internal perusahaan, tetapi sejauh mana manajemen mampu memberikan manfaat ekonomi (promosi anggota) yang nyata. Efektivitas pengelolaan ini sangat bergantung pada bagaimana pengurus menyusun rencana usaha yang matang dan mengorganisir potensi anggota agar sejalan dengan prinsip kekeluargaan. Keberhasilan fungsi-fungsi ini tecermin dari kemampuan organisasi dalam menjalankan operasional harian yang transparan serta adanya mekanisme kontrol yang kuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota, bukan sekadar mengejar keuntungan finansial semata.

Indikator untuk mengukur kualitas pengelolaan koperasi menurut (Rasyid, 2022) adalah sebagai berikut:

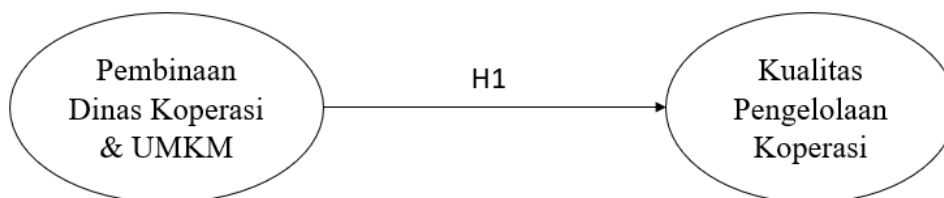
- 1) Transparansi dan akuntabilitas keuangan.
- 2) Peningkatan partisipasi anggota.
- 3) Efisiensi penggunaan aset dan modal.

### **Pembinaan**

Pembinaan oleh pemerintah merupakan bentuk intervensi strategis yang dilakukan secara sistematis untuk memperkuat kapasitas organisasi melalui serangkaian tindakan bimbingan, pemberian arahan, dan penyediaan fasilitas pendukung. Menurut Paramita *et al.*, (2022) pembinaan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sadar, berencana, dan teratur untuk meningkatkan kemampuan objek yang dibina. Pembinaan diartikan sebagai upaya sistematis untuk mengubah perilaku, meningkatkan keterampilan manajerial, serta memperkuat mentalitas pengurus dan anggota agar mampu menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian secara mandiri dan profesional (Ekawati *et al.*, 2021). Pembinaan koperasi oleh pemerintah adalah bentuk pemberian arahan, bimbingan, dan fasilitas yang bertujuan agar koperasi dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang sehat (Tarigan, 2022). Merujuk pada mandat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, esensi pembinaan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari penanaman regulasi melalui sosialisasi, peningkatan keahlian teknis pengelola lewat pendidikan dan pelatihan, hingga pendampingan tata kelola keuangan yang lebih profesional. Lebih jauh lagi, peran ini mengharuskan pemerintah untuk bertindak sebagai penghubung akses permodalan dan pasar, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan ketat guna memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional tetap sejalan dengan koridor hukum yang berlaku.

Indikator untuk mengukur Pembinaan adalah merujuk pada regulasi (UU No. 25 Tahun 1992 atau PP No. 7 Tahun 2021), yang mencakup:

- 1) Pemberian bimbingan pendidikan dan pelatihan (Diklat).
- 2) Pemberian kemudahan akses permodalan.
- 3) Pemberian bantuan konsultasi bisnis dan hukum.
- 4) Pengawasan dan akreditasi koperasi.



**Gambar 1.** Kerangka Penelitian

### **Hipotesis Penelitian:**

**H1:** Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Kualitas Pengelolaan Koperasi di Kabupaten Dompu.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel pembinaan yang dilakukan instansi pemerintah memengaruhi kualitas pengelolaan koperasi di Kabupaten Dompu. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pengurus koperasi aktif di Kabupaten Dompu yang berjumlah 125 Koperasi. Peneliti menggunakan teknik sampling jenuh dengan menjadikan seluruh anggota populasi tersebut sebagai responden penelitian tanpa pengurangan. Pemilihan teknik ini didasarkan pada jumlah populasi yang relatif kecil dan masih terjangkau, sehingga memungkinkan untuk diteliti secara menyeluruh (Priadana & Sunarsi, 2021). Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner terstruktur yang disusun menggunakan skala Likert (1-5),

sehingga setiap indikator pembinaan dan pengelolaan dapat dikonversi ke dalam angka-angka yang objektif untuk dianalisis lebih lanjut (Priadana & Sunarsi, 2021).

Proses pengolahan data diawali dengan uji instrumen berupa Uji Validitas dan Reliabilitas guna menjamin ketepatan serta konsistensi alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Setelah data dinyatakan layak, peneliti melakukan Uji Asumsi Klasik sebagai prasyarat sebelum masuk ke tahap Analisis Regresi Linear Sederhana untuk melihat arah dan besaran pengaruh antar variabel. Tahap akhir pengujian melibatkan Uji Signifikan (Uji T) dan Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) guna menentukan seberapa besar kontribusi pembinaan Dinas Koperasi terhadap perubahan efektivitas pengelolaan koperasi di Kabupaten Dompu, yang kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

**Tabel 1. Uji Validitas Instrumen**

Variabel	Kode Item	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM (X)	X.1	0,543	0,207	Valid
	X.2	0,514	0,207	Valid
	X.3	0,592	0,207	Valid
	X.4	0,412	0,207	Valid
	X.5	0,491	0,207	Valid
	X.6	0,480	0,207	Valid
	X.7	0,598	0,207	Valid
	X.8	0,602	0,207	Valid
Kualitas Pengelolaan Koperasi (Y)	Y.1	0,356	0,207	Valid
	Y.2	0,566	0,207	Valid
	Y.3	0,657	0,207	Valid
	Y.4	0,677	0,207	Valid
	Y.5	0,578	0,207	Valid
	Y.6	0,381	0,207	Valid

**Sumber:** Analisis Data, (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 1, seluruh butir pernyataan untuk variabel Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM (X) serta Kualitas Pengelolaan Koperasi (Y) dinyatakan valid. Hal ini merujuk pada perolehan nilai r hitung yang berkisar antara 0,356 hingga 0,677, di mana seluruh angka tersebut secara konsisten melampaui nilai r tabel sebesar 0,207. Karena setiap indikator memiliki tingkat korelasi yang signifikan di atas ambang batas yang ditentukan, maka instrumen kuesioner ini terbukti memiliki akurasi yang memadai dalam mengukur variabel penelitian dan layak digunakan untuk tahap pengumpulan data selanjutnya.

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Standar	Keterangan
Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM	0,635	0,60	Reliabel
Kualitas Pengelolaan Koperasi	0,674	0,60	Reliabel

**Sumber:** Analisis Data, (2026)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 2, variabel Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM serta Kualitas Pengelolaan Koperasi dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* keduanya telah melampaui ambang batas standar sebesar 0,60. Secara mendetail, variabel pembinaan mencatatkan nilai 0,635 dan kualitas pengelolaan sebesar 0,674, yang membuktikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki konsistensi yang baik dan layak untuk mengumpulkan data secara akurat.

**Tabel 3. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.25954610
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.063
	Positive	.052
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

**Sumber:** Analisis Data, (2026)

Berdasarkan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov terhadap 125 sampel, ditemukan bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) pada variabel *unstandardized residual* adalah sebesar 0,200. Karena nilai tersebut jauh melampaui standar signifikansi minimal 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model penelitian ini berdistribusi secara normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi secara baik, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam analisis statistik parametrik selanjutnya.

**Tabel 4. Uji Multikolinearitas  
Coefficients<sup>a</sup>**

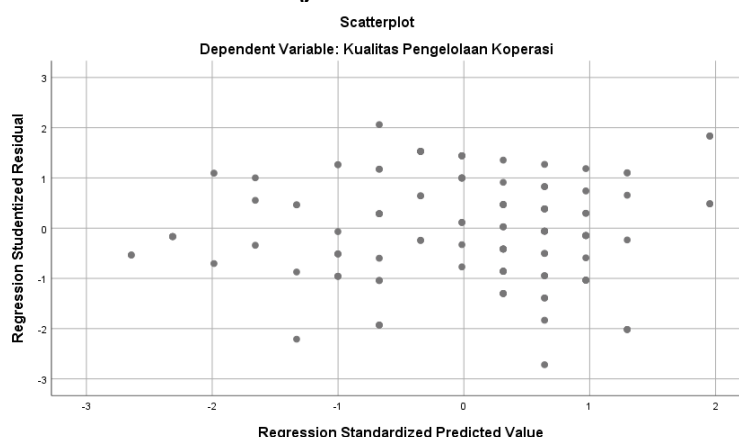
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	18.074	2.287		7.903	.000
Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM	.196	.067	.256	2.931	.004

a. Dependent Variable: Kualitas Pengelolaan Koperasi

**Sumber:** Analisis Data, (2026)

Hasil pengujian multikolinearitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM memiliki nilai *Tolerance* sebesar 1,000 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,000. Mengingat nilai *Tolerance* tersebut lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF jauh di bawah ambang batas 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat atau gangguan korelasi antar variabel independen dalam model ini. Dengan kata lain, model regresi penelitian terbebas dari masalah multikolinearitas dan memenuhi kriteria asumsi klasik yang dipersyaratkan.

**Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Analisis Data, (2026)

Berdasarkan grafik *scatterplot* yang dihasilkan, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur seperti pola yang menyempit, melebar, atau bergelombang. Titik-titik tersebut tersebar merata baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, yang menegaskan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi, sehingga model penelitian dianggap valid dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis statistik parametrik.

**Tabel 6. Uji T (Parsial)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B		Beta		
1(Constant)	18.074	2.287		7.903	.000
Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM	.196	.067	.256	2.931	.004

Sumber: Analisis Data, (2026)

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 6, variabel Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004, yang jauh di bawah ambang batas 0,05. Hal ini membuktikan bahwa variabel pembinaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Koperasi. Dengan nilai t hitung sebesar 2,931, dapat dipastikan bahwa kontribusi instansi terkait bukan sekadar kebetulan, melainkan faktor penting yang memperkuat model penelitian. Nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,196 menunjukkan adanya hubungan searah atau positif antara kedua variabel tersebut. Artinya, setiap peningkatan pada kualitas pembinaan akan diikuti secara linier oleh peningkatan kualitas pengelolaan koperasi di lapangan. Dengan konstanta sebesar 18,074, data ini memberikan pesan yang jelas: intervensi aktif melalui pembinaan dinas berperan sebagai pendorong utama dalam menciptakan tata kelola koperasi yang lebih profesional dan terstandar.

**Tabel 7. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.256 <sup>a</sup>	.065	.058	2.26871	1.918

Sumber: Analisis Data, (2026)

Berdasarkan tabel *Model Summary* di atas, nilai koefisien determinasi atau R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,065. Angka ini menunjukkan bahwa variabel Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi sebesar 6,5% terhadap variasi naik-turunnya Kualitas Pengelolaan Koperasi. Meskipun angka ini terlihat kecil, secara statistik hal ini tetap menunjukkan adanya pengaruh searah yang nyata antara pembinaan yang dilakukan instansi dengan hasil pengelolaan di lapangan. Di sisi lain, terdapat selisih sebesar 93,5% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan koperasi juga sangat bergantung pada variabel eksternal lainnya, seperti kompetensi sumber daya manusia internal, penggunaan teknologi informasi, hingga modal kerja. Dengan demikian, meskipun pembinaan dinas menjadi salah satu faktor penentu, penguatan pada aspek-aspek lain tetap diperlukan untuk mencapai tata kelola koperasi yang optimal secara menyeluruh.

## **Pembahasan**

### ***Pengaruh Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Kualitas Pengelolaan Koperasi di Kabupaten Dompu***

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Koperasi. Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu secara langsung meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan teknis (kompetensi) para pengurusnya. Melalui program yang berfungsi sebagai sarana sekolah seperti pelatihan pembukuan keuangan dan bimbingan teknis (Bimtek), para pengurus mendapatkan suntikan ilmu praktis yang membuat mereka lebih paham dalam menyusun laporan keuangan yang rapi serta mengambil keputusan bisnis yang cerdas. Peningkatan kompetensi ini menjadi kunci utama dalam mentransformasi tata kelola yang sebelumnya tidak teratur menjadi lebih profesional, di mana pengurus yang memiliki bekal pengetahuan teknis mumpuni mampu menekan risiko pembukuan berantakan dan kredit macet demi mewujudkan koperasi yang sehat dan transparan.

Keberhasilan program pembinaan Dinas Koperasi dalam mendongkrak kualitas tata kelola koperasi ini bukanlah sekadar teori, melainkan telah dibuktikan oleh banyak penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati, 2021) menegaskan bahwa praktik pembinaan yang rutin dan konsisten sangat berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas pengurus koperasi. Pendapat ini sejalan dengan temuan Alwalid, (2022) yang membuktikan bahwa strategi pendampingan dari dinas terkait secara langsung mampu meningkatkan daya saing usaha mikro dan koperasi. Khusus di wilayah Nusa Tenggara Barat, Amalyah *et al.*, (2025) menemukan bahwa program bimbingan teknis dari Dinas Koperasi sangat penting dalam membantu koperasi mengelola keuangannya secara lebih optimal dan transparan. Tomyagistyawan & Kusuma, (2023) menyatakan bahwa pembinaan yang terarah adalah kunci untuk menjawab tantangan ekonomi lokal, sementara (Suprianto, 2023) menambahkan bahwa campur tangan Dinas Koperasi lewat pendampingan menjadi pondasi utama agar UMKM dan koperasi bisa mandiri dan usahanya terus berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM memiliki pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap kualitas pengelolaan koperasi di Kabupaten Dompu. Semakin intensif, tepat sasaran, dan berkualitas bimbingan yang diberikan oleh dinas, maka akan semakin rapi dan profesional pula tata kelola koperasi-koperasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, agar perekonomian masyarakat Dompu semakin maju, program pendampingan dari pemerintah tidak boleh hanya sebatas formalitas, melainkan harus berupa bimbingan turun ke lapangan yang terus-menerus agar koperasi lokal bisa tumbuh menjadi lembaga yang sehat dan mandiri.

### **Simpulan Dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengelolaan Koperasi di Kabupaten Dompu, di mana intensitas bimbingan teknis dan pengawasan rutin terbukti secara nyata mampu meningkatkan profesionalisme serta transparansi tata kelola koperasi. Sehubungan dengan temuan tersebut, disarankan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dompu untuk terus meningkatkan program pendampingan yang bersifat berkelanjutan dan turun langsung ke lapangan (*on-site mentoring*), tidak sekadar formalitas administratif, guna memastikan setiap pengurus memiliki kompetensi mumpuni dalam meminimalisir risiko manajemen. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup yang hanya berfokus pada variabel pembinaan formal, sehingga belum memotret faktor eksternal lain seperti fluktuasi ekonomi daerah atau tingkat partisipasi aktif anggota yang mungkin turut memengaruhi stabilitas koperasi. Selain itu, keterbatasan dalam penggunaan data yang bersifat *cross-sectional* menyebabkan penelitian ini hanya menggambarkan kondisi pada satu titik waktu tertentu, sehingga diperlukan penelitian jangka panjang (*longitudinal*) di masa depan untuk melihat konsistensi dampak pembinaan terhadap kemandirian koperasi secara lebih mendalam.

### **Daftar Rujukan**

- Awaluddin, S. P., & Weraman, P. (2023). Pelatihan Pengelolaan SDM di Era Digital pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Sulawesi Selatan. *SABAJAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–8.
- Aryani, W. N., Sari, L., Widara, L. K., & Jayusman, S. F. (2026). Strategi Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan Daya Saing Lokal. *SINOMIKA JOURNAL: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1), 51-56.
- Alwalid, M. (2022). Strategi dinas koperasi dan ukm dalam meningkatkan kemampuan digital pelaku umkm di provinsi bangka belitung. (*Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*).
- Amalyah, DR, Kirana, FAP, Saputra, GM, & Sutanto, H. (2025). Pendampingan Pengelolaan Anggaran untuk Optimalisasi Realisasi Kegiatan BIMTEK di Bidang Pembinaan Koperasi: Studi Kasus Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Periode 2021–2023. *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 33-42.
- Ekawati, D., Ansar, A., Qadrini, L., Nuriah, S., & Maghfirah, A. (2021). Pendampingan dan Pembinaan Analisis Perancangan Survey Dampak Gempa Bumi dan COVID-19 Bagi Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Majene untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Malunda Sulawesi Barat. *Madaniya*, 2(3), 295–301.
- Eman, F. T., Rachman, I., & Pangemanan, F. N. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Manado ( Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Manado ). *Jurnal Governance*, 3(1), 1–10.
- Fadhilah, M. U., Prathama, A., Studil, P., & Publik, A. (2023). Pemberdayaan UMKM Mebel Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2019-2022. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8, 145–157.
- Fahmi, H. M., SE, M., Yuliani, S. E., & Lidiana, S. E. (2026). *Pengantar manajemen*. CV. Nusantara Press Indonesia.
- Fitriani, F., Jumaidi, J., & Noorrahman, M. F. (2024). Efektivitas Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan

- Ukm Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(1), 97–104.
- Hidayati, N. (2021). *Koperasi dan UKM: Teori dan Praktik Pembinaan*. Bandung: Alfabeta.
- Hariyanto, S., & Manajemen, S. I. (2017). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota samarinda (studi pada dinas koperasi dan UMKM kota samarinda). *EJournal Administrasi Negara*, 80–85.
- Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Metris, D., Kraugusteeliana, K., Amory, JDS, Mustafa, F., & Risdwiyanto, A. (2024). Pengaruh dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan UMKM di era digital. *Jurnal Terobsan Peduli Masyarakat (TIRAKAT)*, 1 (1), 21-29.
- Nawawi, Z. M. (2022). Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan terhadap pelaku UMKM dalam upaya memperluas pasar produk UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 291–297. <https://doi.org/10.47467/elmujitama.v2i3.1372>
- Nuraisyah, N. (2019). *Perankepaladinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (umkm) Dalam Melakukan Pembinaan Umkm Kerupuk Udang Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir*.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*.
- Paramita, G., Sundawa, R. D., & Musqari, N. (2022). Pembinaan dan pengembangan manajerial bisnis kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah kecamatan Jatinegara Jakarta timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (JPMEMA)*, 1(1), 34–40.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*.
- Putra, G. R., & Zubaidah, E. (2024). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pembinaan Kewirausahaan Usaha. *Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1219–1235.
- Purwadhinata, S., Firmansyah, F., Farisya, D., Hadi, M. H., & Rafsanjani, H. A. (2026). Analisis Produktivitas Pejabat Struktural pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Model Evaluasi Kinerja SKPD berbasis Balanced Scorecard dan Value for Money (FEE). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 19(1), 103-125.
- Rasyid, A. S. R. (2022). Pengelolaan Koperasi Makalah ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah. 1–12.
- Santya, V. M., & Kustini, K. (2025). Penguatan Peran Dinas Koperasi dalam Pengawasan untuk Meningkatkan Kinerja Koperasi di Kota Surabaya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(2), 422–431.
- Suprianto, S. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Pada UMKM Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Penjual Kue Karasa Kecamatan Mattiro Bulu Pinrang). (*Doctoral Dissertation, IAIN PAREPARE*).
- Sundari, A. (2024). Pelatihan Pengelolaan SDM di Era Digital pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 85–91.
- Syamil, A., Destiana, D., Utami, E. S., Ginanjar, R., Lestari, P. B., & Pertiwi, H. P. (2026). *Buku Ajar Manajemen Strategis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suryana, D. (Ed.). (2026). *Kepemimpinan dan Manajemen*. Dayat Suryana Independent.

- Sukmaya, R., Busriadi, B., Wulandani, N., Fadhilah, M. N., Pratama, A. D., & Putri, Y. (2026). Strategi Penguatan UMKM Melalui Pelatihan Pemasaran Digital Berbasis Pemasaran Syari'ah: Studi pada Dinas Koperasi Bagian UMKM Kabupaten Bungo. *Khidmatan*, 6(1), 66-74.
- Tarigan, M. I. (2022). Pembinaan dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dalam Rangka Digitalisasi UMKM, Sumatera Utara. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 156–160.
- Tomyagistyawan, D., & Kusuma, S. H. (2023). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Madiun. *Jurnal Teknik ITS*, 12(3), C185-C192.
- Wulansari, A., Hakim, L., Ramdani, R., & Karawang, U. S. (2021). Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 82–93.